

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu ciri negara yang maju yaitu memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Derajat kesehatan di suatu negara dapat menentukan kualitas sumber daya manusia. Derajat kesehatan menjadi sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Negara dengan tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan memungkinkan memiliki sumber daya manusia yang baik, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang produktif untuk menjalankan pergerakan roda suatu negara. Dengan begitu menjadi sangat penting bagi suatu negara untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan harus menjadi perhatian yang utama bagi suatu negara, karena pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi bagi setiap negara untuk memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi. Salah satu yang menjadi indikator dari pembangunan kesehatan yaitu tersedianya akses fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu wahana yang digunakan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan demi terciptanya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik dalam upaya pencegahan penyakit, pengedukasian masyarakat, pengobatan penyakit, dan pemulihan sakit yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukannya upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, selain diperlukannya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai diperlukan juga peran pemerintah untuk ikut serta terlibat dalam proses peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah harus memiliki target dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan adanya target yang ditetapkan maka pemerintah perlu mencanangkan standar yang harus menjadi acuan target capaian bagi seluruh elemen kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu program pemerintah yang mencakup mutu pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh setiap daerah yang ada di Indonesia demi terpenuhinya hak bagi seluruh masyarakat untuk tetap hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa SPM merupakan program kementerian yang selanjutnya menjadi kinerja bagi setiap daerah, yang dalam pelaksanaannya setiap daerah harus mencapai target capaian SPM sebesar 100% setiap tahunnya. Dengan begitu pemerintah daerah harus menyiapkan dan memastikan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan meliputi tenaga, sarana dan prasarana, alat dan juga biaya yang memadai agar proses pelaksanaan SPM di masing-masing daerah berjalan maksimal dan mencapai target capaian. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 jenis layanan kesehatan dasar yang harus dilakukan oleh setiap daerah diantaranya yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan bagi usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dalam gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan TB, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Dari keduabelas jenis pelayanan dasar tersebut, seluruhnya memiliki target capaian sebesar 100% yang harus dipenuhi oleh setiap daerah.

Pelaksanaan SPM dibutuhkan kesiapan dari berbagai pihak baik dari tatanan pemerintahan pusat maupun tatanan pemerintahan daerah. Yang tentunya dalam hal ini pemerintah daerah merupakan tumpuan yang harus memiliki kesiapan yang cukup dan matang demi terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan yang dalam hal ini

Puskesmas menjadi garda terdepan dalam melakukan pelaksanaan SPM bidang kesehatan yang potensial untuk memenuhi target-target SPM bidang kesehatan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 266,91 juta jiwa dengan jumlah provinsi sebanyak 34 provinsi dan sebanyak 514 kota dan kabupaten tersebar di Indonesia (Badan Pusat Statistika, 2019). Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 49,94 juta jiwa. Jawa Barat memiliki 27 kota dan kabupaten. Kota Sukabumi yang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat menjadi fokus utama dari penelitian ini. Kota Sukabumi memiliki jumlah penduduk sebanyak 334.033 jiwa dengan 7 kecamatan dan 33 kelurahan yang tersebar di dalamnya (BPS Jabar, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Seluruh penduduk yang ada di Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar karena hal tersebut merupakan hak dasar yang harus diterima oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Sukabumi yang merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Berdasarkan indikator capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2019, target capaian seluruh indikator yaitu sebesar 100%. Ditetapkannya target 100% dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengikuti peraturan yang berlaku serta menggunakan hak prerogatifnya untuk tidak menurunkan target capaian karena Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memiliki paradigma bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal merupakan jenis pelayanan dasar yang berhak dimiliki oleh setiap masyarakat, dengan begitu Pemerintah Kota Sukabumi berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal bagi masyarakat khususnya yang ada di Kota Sukabumi.

Namun berdasarkan data Profil Kesehatan Jawa Barat tahun 2019, persentase capaian pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Provinsi Jawa Barat sebesar 44,5% dan didapati Kota Sukabumi menjadi urutan terendah dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yaitu sebesar 9,60% dan diketahui berdasarkan data laporan SPM bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2019 hasil capaian yang di dapatkan untuk pelayanan kesehatan minimal bagi penderita hipertensi menduduki angka capaian

terendah diantara 12 indikator pelayanan kesehatan dasar yaitu sebesar 9,60%. Adapun Puskesmas Cipelang merupakan salah satu Puskesmas dengan capaian SPM dengan indikator pelayanan kesehatan minimal bagi penderita hipertensi yang rendah dan masih jauh dari target capaian yaitu untuk pelayanan kesehatan bagi penderita Hipertensi usia 15-59 tahun secara kumulatif sebesar 34% dan Lansia sebesar 35,01%. Angka tersebut menjadi masalah yang perlu diperhatikan terlebih hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang apabila dibiarkan akan berbahaya bagi penderitanya dan akan memungkinkan untuk terjadinya komplikasi (Anindya, 2020).

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit tidak menular yang terjadi akibat peningkatan tekanan darah sistolik mencapai lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolic mencapai lebih dari 90 mmHg yang pada prosesnya pengukuran dilakukan dua kali dengan selang waktu lima menit dan pengukuran harus dalam keadaan istirahat/tenang (PERKI, 2015). Menurut WHO tahun 2015 menyebutkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi, dengan begitu artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penderita hipertensi diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. WHO juga memperkirakan pada tahun 2025 akan didapati sekitar 1,5 miliar orang yang mengalami hipertensi, akan diperkirakan juga setiap tahunnya sebanyak 10,44 juta orang akan meninggal akibat hipertensi dan komplikasi. Data Riskesdas tahun 2018 juga menyebutkan prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 34,1% sedangkan prevalensi hipertensi pada tahun 2013 sebesar 25,8% yang artinya terdapat peningkatan angka prevalensi hipertensi di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2018 sebesar 8,3%. Selain itu, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 juga menyebutkan Jawa Barat merupakan provinsi yang menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus hipertensi tertinggi di Indonesia sebesar 39,6% setelah Provinsi Kalimantan Selatan yang menduduki peringkat satu kasus hipertensi tertinggi yaitu sebesar 44,1%. Didapati juga pada data Profil Kesehatan Jawa Barat, Kota Sukabumi menduduki peringkat kedua dengan kota yang memiliki angka penderita hipertensi paling tinggi. Dilakukan pengukuran tekanan darah pada 21.693 jiwa penduduk Kota Sukabumi dan didapati hasil bahwa sebanyak 20.286 jiwa memiliki tekanan darah tinggi yang artinya sebanyak 93,51% penduduk Kota

Sukabumi dari 21.693 jiwa yang melakukan pengukuran tekanan darah tinggi dinyatakan menderita hipertensi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka perlu dilakukan suatu penelitian terkait pelaksanaan SPM penderita Hipertensi di Kota Sukabumi khususnya di Puskesmas Cipelang. Pelaksanaan pelayanan minimal bagi penderita Hipertensi harus dilakukan dengan masiv dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan komplikasi akibat Hipertensi.

I.2 Rumusan Masalah

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang dapat dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius bagi penderitanya bahkan sampai terjadi komplikasi. Terlepas dari hal tersebut, didapati data dari Profil Kesehatan Jawa Barat tahun 2019, persentase capaian pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Provinsi Jawa Barat sebesar 44,5% dan didapati Kota Sukabumi menjadi urutan terendah dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun yaitu sebesar 9,60%. Laporan capaian SPM Kota Sukabumi tahun 2019 juga menyebutkan bahwa pelayanan minimal bagi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun menduduki urutan paling rendah dengan capaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diperoleh sebesar 9,60% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian Puskesmas Cipelang untuk pelayanan kesehatan bagi penderita Hipertensi usia 15-59 tahun secara kumulatif sebesar 34% dan Lansia sebesar 35,01%. Dengan begitu, berdasarkan data tersebut rumusan masalah pada penelitian ini yaitu belum terpenuhinya cakupan masyarakat secara menyeluruh untuk mendapatkan haknya memperoleh pelayanan kesehatan minimal khususnya bagi penderita hipertensi di Puskesmas Cipelang Tahun 2019.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis implementasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita hipertensi di Puskesmas Cipelang tahun 2019.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis input terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal penderita hipertensi di Puskesmas Cipelang tahun 2019
- b. Menganalisis proses terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal penderita hipertensi di Puskesmas Cipelang tahun 2019
- c. Menguraikan output terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal penderita hipertensi di Puskesmas Cipelang tahun 2019

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memperluas keilmuan dalam bidang kesehatan masyarakat khususnya terkait implementasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan pada penderita hipertensi.

I.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan bagi seluruh civitas akademika UPN Veteran Jakarta khususnya program studi kesehatan masyarakat untuk selanjutnya dapat dikembangkan dalam keilmuan kesehatan masyarakat dan menjadi sumber tambahan bagi kepustakaan program studi kesehatan masyarakat UPN Veteran Jakarta.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pengetahuan yang mudah di akses oleh masyarakat guna memahami dan mengetahui pentingnya pelayanan kesehatan minimal sesuai dengan standar bagi masyarakat khususnya penderita hipertensi.

- c. Bagi Puskesmas

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan bagi setiap Puskesmas untuk dapat memaksimalkan kinerja puskesmas supaya capaian Standar Pelayanan Minimal khususnya pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai dengan standar dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Bagi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk evaluasi kedepannya terkait capaian Standar Pelayanan Minimal yang diperoleh dengan implementasi di Puskesmas mulai dari input, proses, sampai dengan output yang dihasilkan.

I.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung dari informan, dan data sekunder berupa hasil laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2019. Adapun penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Jenis informan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Serta dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknis sebagai metode yang dilakukan dalam memvalidasi data pada penelitian. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui implementasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan penderita hipertensi di Puskesmas Cipelang tahun 2019.